



Media Title	Investor Daily		
Head Line	3 Poin Perpres Tol Trans-Sumatera Dikaji		
Date	27 Feb 2014	Color	
Section	News	Circulation	
Page No	6	Article Size	
Journalist	ean	Advalue	
Frequency	Daily	PR Value	

3 Poin Perpres Tol Trans-Sumatera Dikaji

JAKARTA – Pemerintah tengah mengkaji tiga poin baru dalam peraturan presiden (perpres) mengenai penugasan pembangunan jalan tol trans-Sumatera. Ketiga poin itu bertujuan untuk mengantisipasi berhentinya proyek itu di tengah jalan.

Deputi bidang Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Dedy S Priatna mengatakan, pemerintah tetap akan menunjuk badan usaha milik negara (BUMN) yang sahamnya dimiliki 100% oleh pemerintah untuk mengerjakan tol trans-Sumatera. “Namun, keputusan akhir akan diputuskan dalam sidang kabinet dalam waktu dekat ini,” tutur dia di Jakarta, Rabu (26/2).

Saat ini, sambung dia, Kementerian Pekerjaan Umum meminta waktu sepekan untuk mengevaluasi tiga poin dalam draf perpres penugasan tol trans-Sumatera. Poin pertama yang dievaluasi mengenai kemungkinan jika Utama Karya—selaku BUMN yang akan ditunjuk tidak dapat memenuhi kewajiban untuk menyelesaikan proyek tersebut.

Kedua, bila terpaksa pemerintah yang harus mengerjakan 100% proyek itu, pemerintah bisa menunjuk BUMN lain. Ketiga, pemerintah berhak menunjuk badan usaha untuk mengelola jalan tol itu sebagaimana jalan tol Jagorawi. Namun, mekanisme ini ma-

sih perlu dikaji apakah melalui tender ataupun penugasan.

Dedy menambahkan, setelah pembahasan tiga poin selesai akan dibahas di sidang kabinet. Adapun perpres tol trans-Sumatera ini direncanakan diteken pada Maret 2014, sehingga dana penyertaan modal negara (PMN) Rp 2 triliun bisa cair. Dengan begitu, pada Juli-September bisa dimulai konstruksi. “Jika Maret tidak diteken, PMN dialokasikan untuk pos lain,” ujar dia.

Sementara itu, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Achmad Gani Ghazali mengatakan, bila tanah belum bebas, badan usaha yang ditunjuk pemerintah membangun jalan tol trans-Sumatera tetap tidak bisa memulai konstruksi, meski penyertaan modal negara (PMN) sudah dicairkan.

Kendati demikian, sambung dia, bila tanah sudah bebas minimal 70%, BUMN yang ditunjuk tinggal mencari kontraktor untuk membangun. “Penugasan ini bisa lebih cepat, karena hilangkan proses prakualifikasi tender yang butuh lima hingga enam bulan,” kata dia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa menambahkan, ada sejumlah hal yang perlu direvisi dalam draf perpres tol trans-Sumatera terkait dengan jumlah kebutuhan dana, penugasan BUMN pelaksana, risiko keekonomian, dan ketatalaksanaan

pemerintahannya (*governance*).

Revisi ini dinilai penting guna mengantisipasi berbagai hambatan pelaksanaan paket proyek tol itu. “Sebelum perpres ada, kami ingin kaji ulang supaya benar-benar solid dan ketika kami berikan itu bisa berjalan,” jelas Hatta.

Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengatakan revisi ini dilakukan karena pihaknya meragukan kinerja BUMN yang ditunjuk untuk menyelesaikan proyek ini dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi ekonomi nasional pada saat ini. Selain itu, Djoko mengaku mekanisme PNM terhadap BUMN baru pertama kali dilakukan, sehingga belum bisa dipastikan kelancarannya.

“Kami khawatir semua itu terkunci. Maka dari itu, kesiapan perpres masih ada ruang untuk diubah dan harus selesai dalam waktu seminggu,” ujar dia.

Proyek tol trans-Sumatera terdiri atas 23 ruas dari Lampung-Nanggroe Aceh Darussalam. Total panjang jalan bebas hambatan ini mencapai 2.700 kilometer dengan biaya investasi sebesar Rp 360 triliun.

Dari 23 ruas jalan tol trans-Sumatera, pemerintah berencana membangun empat ruas terlebih dahulu. Adapun empat ruas tahap pertama tersebut meliputi Medan-Binjai, Pekanbaru-Dumai, Palembang-Indralaya, dan Bakaheuni-Terbanggi Besar dengan total panjang mencapai 436 kilometer. (wyu/ean)